

**Laporan Triwulan I**  
**Kategori Tema Aduan : *Safeguard***  
**Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)**  
**Program KOTAKU (NSUP)**  
**(Kota Tanpa Kumuh)**  
**KOTAKU-1 (WB)**  
**Periode Januari s.d Maret 2020**

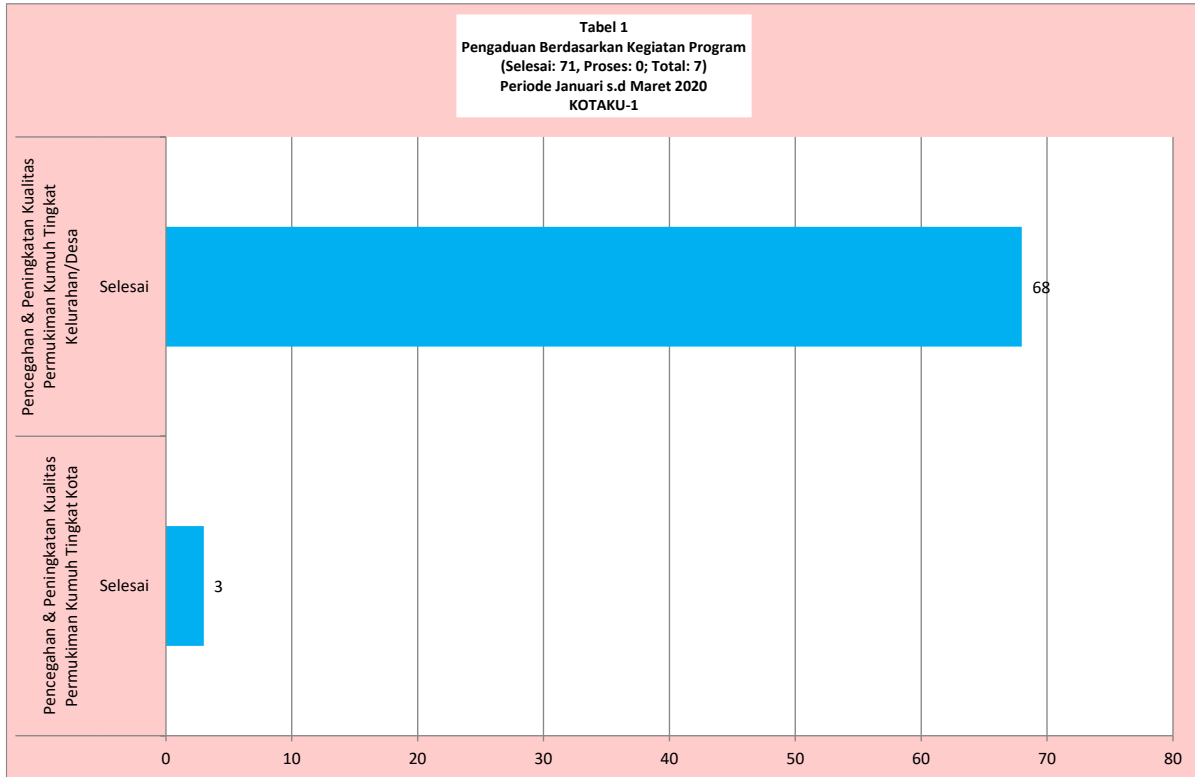
Dalam mewujudkan amanah UUD 1945 pasal 28 E (3): *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*, dalam tatanan demokrasi dan keterbukaan tentu tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti di bidang pelayanan publik.

Mengingat kegiatan Program KOTAKU yang semakin berkembang, dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kekumuhan permukiman memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial. Meskipun tidak signifikan dan sangat kecil kemungkinan akan menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, Program ini membutuhkan upaya pengelolaan potensi dampak yang terjadi.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program ini akan mengadopsi kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang sudah diterapkan pada program PNPM Mandiri Perkotaan yang lalu. Masyarakat diberi peluang dan mendorong munculnya peran aktif mereka untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola secara partisipatif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan mana kala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: *Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.*

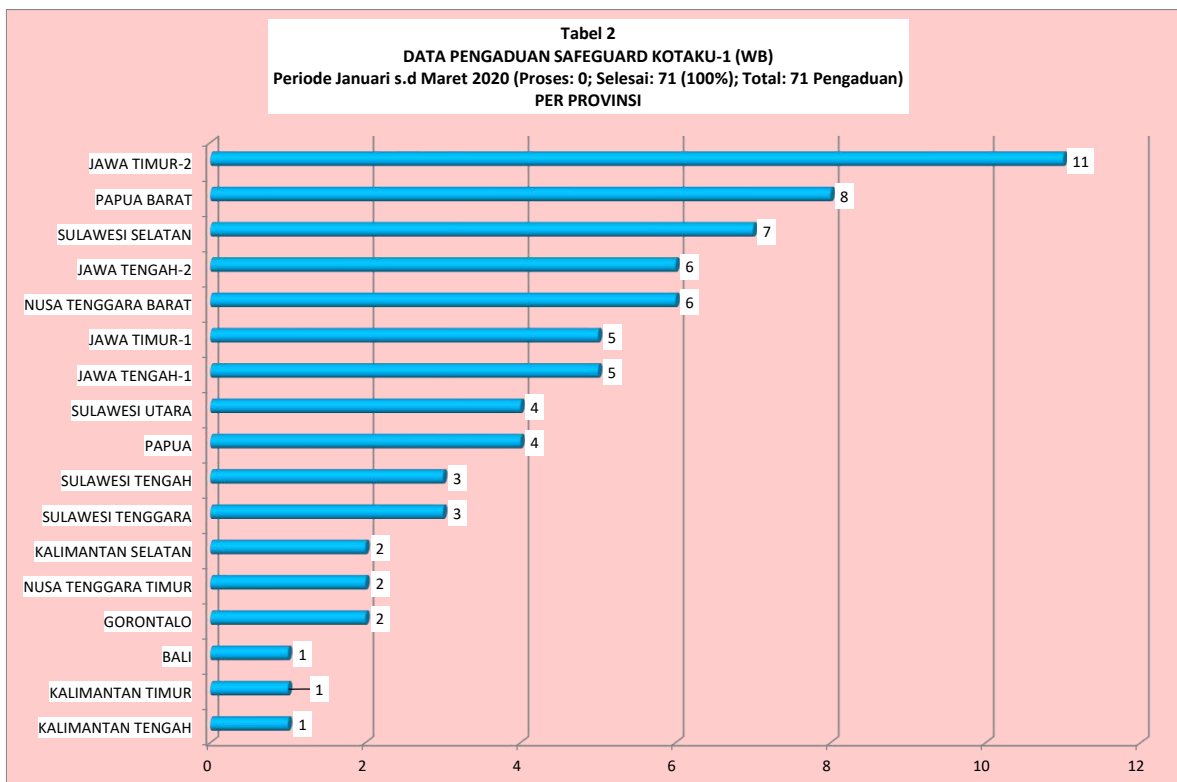
Berdasarkan data SIM PIM triwulan 1 periode Januari s.d Maret 2020, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 yang berberkaitan dengan safeguard berjumlah 71 pengaduan (selesai 71 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



Progres pengaduan di periode Januari s.d Maret 2020 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kel/desa yang didominasi oleh Provinsi Jawa Timur-2 (11 pengaduan). Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kota didominasi oleh Provinsi Papua Barat (2 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Tabel 1a JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	BALI	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	NUSANTENGGARA BARAT	NUSANTENGGARA TIMUR	PAPUA BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGGAH	SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR-2	JAWA TENGAH-2	JAWA TIMUR-1	JAWA TENGAH-1	Grand Total
	Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kelurahan/Desa	1	2	2	1	6	2	4	6	7	3	3	4	11	6	5	5
Selesai	1	2	2	1	6	2	4	6	7	3	3	4	11	6	5	5	68
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota					1			2									3
Selesai					1			2									3
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>71</b>

Pada tabel 2 terlihat bahwa tidak seluruh Provinsi di wilayah dampingan KOTAKU 1 (WB) ada pengaduannya yang berhubungan dengan *safeguard* pada periode Januari s.d Maret 2020.



**Progres PIM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1  
Kategori Tema Aduan : *Safeguard* Periode Januari s.d Maret 2020**

**1. Gambaran Umum**

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PIM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 yang terjadi pada periode Januari sampai dengan Maret 2020, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 71 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 71 (100%) pengaduan dan status proses sejumlah 0 (0%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 69 (97,2%) [selesai 69 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 2 (2,8%) [selesai 2 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan jenis aduan dengan kategori tema aduan: *safeguard*.

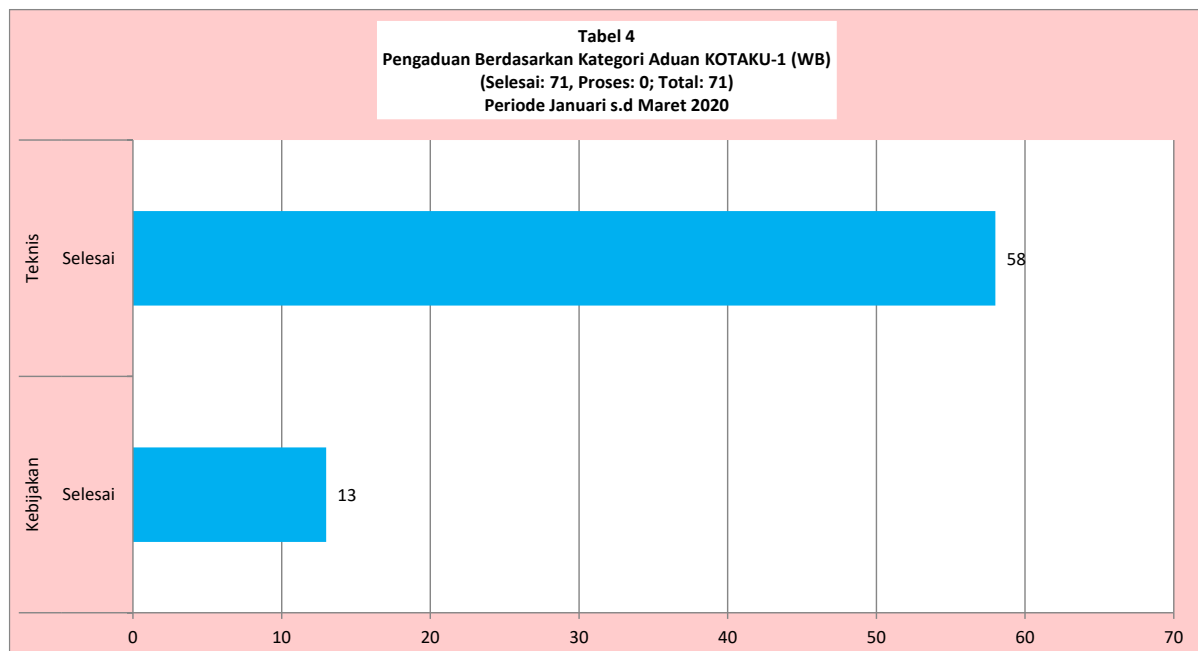
Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Aduan (Informasi/Aspirasi & Masalah) Kategori Tema Aduan : <i>Safeguard</i>				
KOTAKU-1 (WB)				
Januari 2020 - Maret 2020				
<b>INFORMASI/ASPIRASI</b>				
NO.	JENIS ADUAN	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Permintaan Informasi	19	-	19
2	Penyampaian Aspirasi	50	-	50
Sub Total		69	-	69
<b>MASALAH</b>				
NO.	KATEGORI MASALAH	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Pelanggaran administrasi	-	-	-
2	Pelanggaran Kode Etik	-	-	-
3	Ketidaksesuaian/pelanggaran kebijakan, aturan, mekanisme, prosedur	-	-	-
4	Penyimpangan standar & kualitas pekerjaan Infrastruktur	2	-	2
5	Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang	-	-	-
6	Penyalahgunaan Dana	-	-	-
7	Force Majeure	-	-	-
Sub Total		2	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>	<b>-</b>	<b>71</b>
Persentase		100,00%	0,00%	

Sumber: Data SIM PIM Jan\_Maret 2020

## 2. Pengaduan Berdasarkan Kategori Aduan (d/h Bidang Pengaduan)

Berdasarkan kategori aduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) kebijakan, (2) administrasi, (3) keuangan, dan (4) teknis. Adapun yang dimaksud kebijakan adalah mencakup seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan (Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Konsultan) yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah yang menjadi kewenangannya. Sedangkan administrasi yaitu mencakup kegiatan penyusunan, pengisian dan pendokumentasian administrasi yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk keuangan adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengalokasian, pencairan, pemanfaatan dan pengendalian keuangan sesuai ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Adapun mengenai teknis adalah mencakup mekanisme dan prosedur pelaksanaan dan output kegiatan baik kegiatan infrastruktur, Sosial dan ekonomi serta pengelolaan SDM sesuai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.



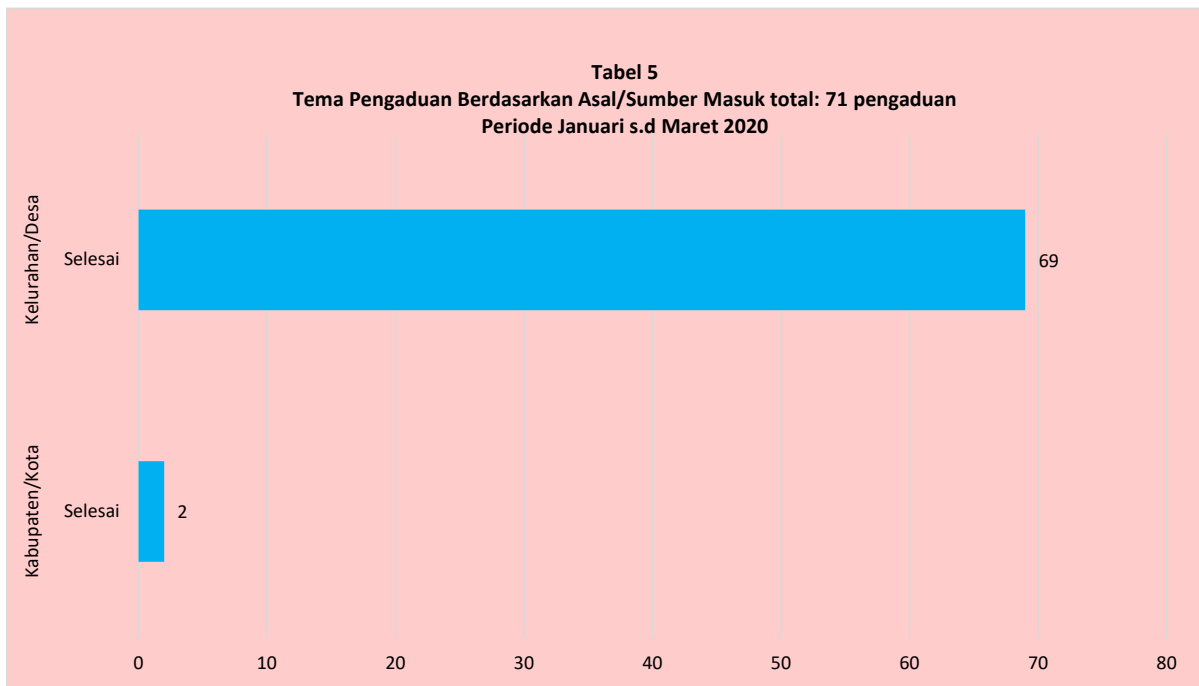
Pada tabel 4 dalam kategori aduan kebijakan sebanyak 13 pengaduan (selesai 13 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan kategori aduan teknis sebanyak 58 pengaduan (selesai 58 (100%), proses 0 (0%) pengaduan. Selengkapnya lihat tabel 4a per provinsi.

KATEGORI ADUAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	B A L I	G O R O N T A L O	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A B A R A T	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	J A W A T I M U R - 2	J A W A T E N G A H - 2	J A W A T I M U R - 1	J A W A T E N G A H - 1	G r a n d T o t a l	
																			1
<input type="checkbox"/> Kebijakan	1	1				1	1		2	1			2	1	1	1	1	1	13
Selesai	1	1				1	1		2	1			2	1	1	1	1	1	13
<input type="checkbox"/> Teknis		1	2	1	1	5	1	4	6	6	3	3	2	10	5	4	4	4	58
Selesai		1	2	1	1	5	1	4	6	6	3	3	2	10	5	4	4	4	58
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	

### 3. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan sebanyak 69 pengaduan sedangkan Kabupaten/Kota sebanyak 2 pengaduan pada periode Januari s.d Maret 2020.

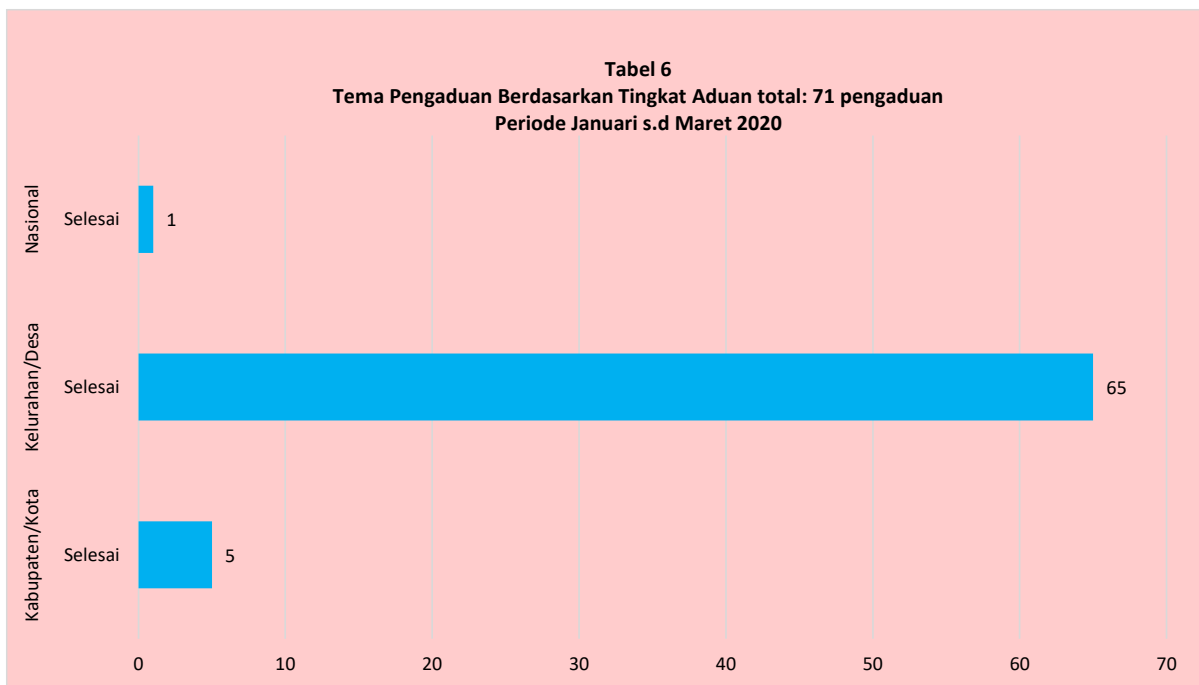


Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

SUMBER ADUAN/TEMA ADUAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	B A L I	G O R O N T A L O	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	J A W A T I M U R - 2	J A W A T E N G G A H - 2	J A W A T I M U R - 1	J A W A T E N G G A H - 1	G r a n d T o t a l	
																			Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota									2										2
Selesai									2										2
Kelurahan/Desa	1	2	2	1	1	6	2	4	6	7	3	3	4	11	6	5	5	5	69
Selesai	1	2	2	1	1	6	2	4	6	7	3	3	4	11	6	5	5	5	69
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	

#### 4. Pengaduan berdasarkan Tingkat Aduan

Tingkat aduan menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan aduan, yaitu: tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat KMW/Propinsi, dan Tingkat Nasional.



Pada periode Januari s.d Maret 2020 penanganan pengaduan berdasarkan tingkat aduan di Kelurahan sebanyak 65 pengaduan, di Kabupaten/Kota sejumlah 5 pengaduan, dan di Nasional sebanyak 1 pengaduan. Lihat tabel 6a berdasarkan per provinsi.





Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada periode Januari s.d Maret 2020 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebanyak 64 pengaduan (90%) dari total 71 pengaduan. Tabel 7a berdasarkan per provinsi.

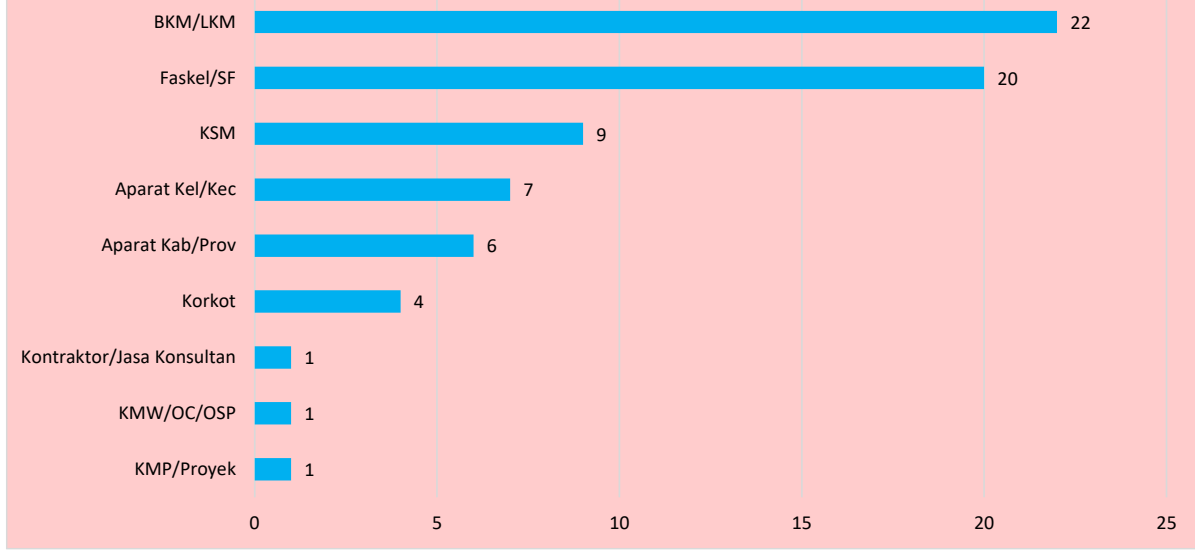
Tabel 7A		MEDIA ADUAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1															
	BAL I	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	NUSANTARA BARAT	NUSANTARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR - 2	JAWA TENGAH - 2	JAWA TIMUR - 1	JAWA TENGAH - 1	Grand Total
Media sosial yang tidak langsung dikelola program																1	1
Selesai																1	1
Media sosial								1									1
Selesai								1									1
Telepon			1					1									2
Selesai			1					1									2
SMS, Aplikasi Pesan lainnya										1							1
Selesai										1							1
Tatap langsung (pertemuan, kunjungan lapangan)	1	2	1	1	1	6	2	3	7	6	3	3	4	10	6	4	64
Selesai	1	2	1	1	1	6	2	3	7	6	3	3	4	10	6	4	64
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>71</b>

## 6. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada periode Januari s.d Maret 2020 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah BKM/LKM dengan jumlah 22 pengaduan (31%) dari total 71 pengaduan.

**Tabel 8**  
**Pengaduan Berdasarkan Pelaku yang di Adukan total: 71 pengaduan**  
**Periode Januari s.d Maret 2020**

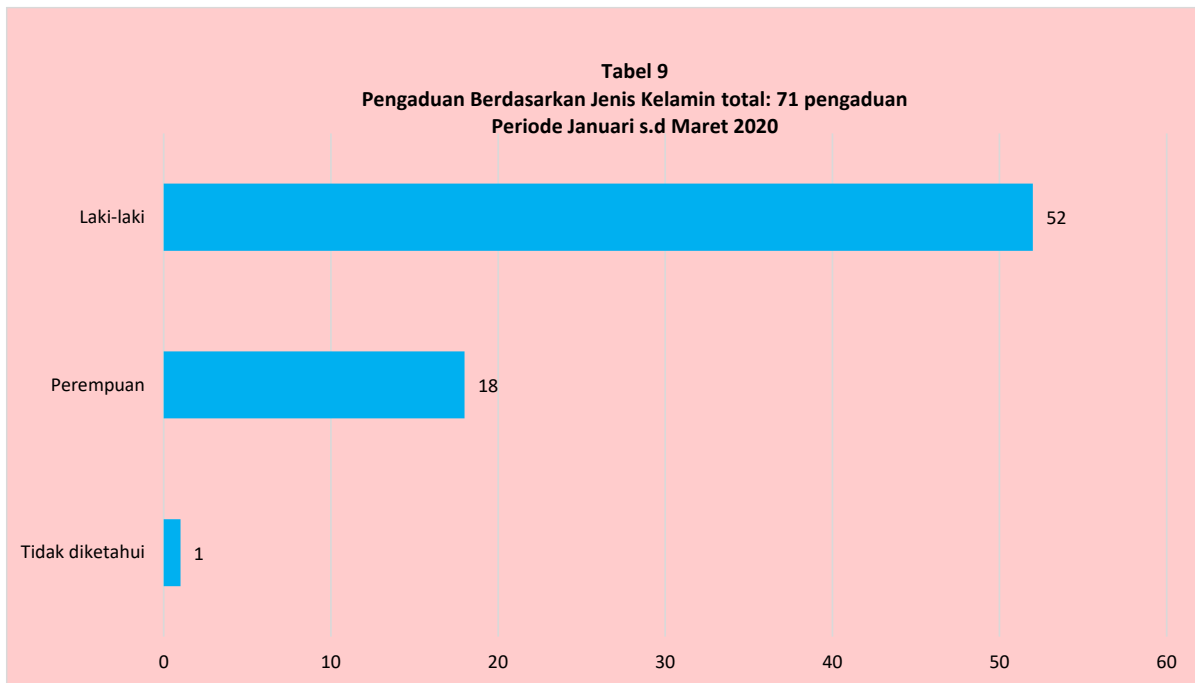


Tabel 8a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 8A PELAKU YANG DIADUKAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	BALI	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	NUSANTENGAH BARAT	NUSANTENGAH TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR - 2	JAWA TENGAH - 2	JAWA TIMUR - 1	JAWA TENGAH - 1	Grand Total	
<input type="checkbox"/> KMP/Proyek						1												1
Selesai						1												1
<input type="checkbox"/> KMW/OC/OSP													1					1
Selesai													1					1
<input type="checkbox"/> Kontraktor/Jasa Konsultan										1								1
Selesai										1								1
<input type="checkbox"/> Korkot						3		1										4
Selesai						3		1										4
<input type="checkbox"/> Aparat Kab/Prov					1				1				2					6
Selesai				1				1				2						6
<input type="checkbox"/> Aparat Kel/Kec	1				1				1	2						2		7
Selesai	1				1				1	2						2		7
<input type="checkbox"/> KSM	1							4	1	2					1			9
Selesai	1							4	1	2				1				9
<input type="checkbox"/> Faskel/SF						1		3	2	1	1	1	1	3	5	2	1	20
Selesai						1		3	2	1	1	1	3	5	2	1		20
<input type="checkbox"/> BKM/LKM	1	2	1		1	1		2	1	2			2	7	1	1	2	22
Selesai	1	2	1		1	1		2	1	2			7	1	1	2		22
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71</b>

## 7. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui. Berdasarkan data pada periode Januari s.d Maret 2020 pengaduan berdasarkan jenis kelamin, yaitu Laki-laki dengan jumlah 52 pengaduan (73,2%) dan Perempuan sebanyak 18 pengaduan (25,4%), serta tidak diketahui sebanyak 1 pengaduan (1,4%) dari total 71 pengaduan.



Tabel 9a berdasarkan per provinsi.

Jenis Kelamin	Provinsi/Program													Grand Total				
	BALI	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	NUSANTENGAH BARAT	NUSANTENGAH TIMUR	PAPUA BARAT	PAPUA	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR - 2		JAWA TENGAH - 2	JAWA TIMUR - 1	JAWA TENGAH - 1	
Laki-laki	1	1		1	5	1	3	5	6	3	3	3	7	4	4	5	52	
Selesai	1	1		1	5	1	3	5	6	3	3	3	7	4	4	5	52	
Perempuan		1	2	1		1	1	1	3	1			1	3	2	1	18	
Selesai		1	2	1		1	1	1	3	1			1	3	2	1	18	
Tidak diketahui														1			1	
Selesai														1			1	
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71</b>

Dalam laporan triwulan 1 periode Januari s.d Maret 2020 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 dengan kategori tema aduan *safeguard* berjumlah 71 pengaduan (selesai 71 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dengan kategori tema aduan *safeguard* dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 68 pengaduan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pecegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota sejumlah 3 pengaduan.

Pada laporan triwulan PIM ini tidak seluruh Provinsi ada pengaduannya yang berhubungan dengan *safeguard*. Adapun penginputan data aduan pada SIM PIM masih berbasis MS Excel, karena masih ada kendala pada aplikasi SIM PIM berbasis website.

--- 000 ---



<b>ISI PENGADUAN</b>
<p><b>Pembangunan Ipal komunal tidak selesai sesuai dengan target yang di tentukan dan aktifitas masyarakat terganggu dengan material yang ada di halaman rumah warga sehingga masyarakat melakukan pemalangan pekerjaan IPal Komunal</b></p>
<p>tim korkot bersama fasilitator dan BKM melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas permasalahan yang terjadi dan telah di sepakati pekerjaan akan segera di selesaikan sehingga masyarakat memahami dan sepakat membuka palang.</p>
<p><b>000194710220</b></p>
<p><b>Pipa Hdp dari sumur bor belum di rapikan oleh tukang yang mengerjakan sumursehingga masyarakat melakukan pemalangan pekerjaan IPal Komunal</b></p>
<p>fasilitaor menyampaikan kepada Ksm untuk segera memperbaiki/merapikan Pipa dan hasilnya KSM sudah merapikan pipa HDP terbukti dengan adanya pipa sudah terlihat rapi</p>
<p><b>000200000220</b></p>
<p><b>a. Disitu dikatakan surat perjanjian pembongkaran kanopi yang menjorok ke pedestrian tapi saya dapat laporan disuruh mundur lagi Dan hal itu tidak aja perjanjian</b></p>
<p>Setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi lapangan , tidak ditemukan keluhan sebagaimana disampaikan pengadu Klarifikasi dilakukan di Jl. Teratai 3 yaitu dilokasi pembongaran bangunan dengan di danai dari APBD TA 2019. Perihal rencana pembongkraan kanopi dan papan reklame di Jl Jenderal Sudirman Ambarawa sesuai dengan hasil Sosialisasi di Gedung Gotong Royong Ambarawa dan Surat Pernyataan WTP dilakukan secara mandiri dan tidak ada ganti rugi..</p>
<p><b>000233220320</b></p>
<p><b>Bagaimana cara masyarakat bisa mempunyai septitank kalau lahan aja g ada</b></p>
<p>Jika tidak ada tanah kosong untuk di pakai septitank,bisa di lakukan di tengah jalan kampung dengan aturan yang telah disepakati</p>
<p><b>000273060120</b></p>
<p><b>Warga Protes Penempatan Gazebo</b></p>
<p>BKM segera memindahkn lokasi Gazebo yang tentunya disertai dengan beriat acara kesepakatan yang telah disepakati</p>
<p><b>000333110120</b></p>
<p><b>Menanyakan keberlanjutan terkait adanya pertanyaan terkait status lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan</b></p>
<p>Terkait status lahan yang digunakan dalam kegiatan BPM, KSM sudah memiliki dokumentasi berkas yang diperlukan dan sudah berkoordinasi baik dengan masyarakat dan pemkel jadi sudah tidak ada masalah terkait status lahan.</p>
<p><b>000352010120</b></p>
<p><b>Dalam pengisian surat ijin pakai jamban, apabila tidak ada keluarga atau ahli waris dari si penerima manfaat apakah tidak masalah di kosongkan atau bisa diisi dengan keluarga atau kerabat jauh. (3)</b></p>
<p>Korkot memberikan penjelasan kepada penanya bahwa untuk surat ijin pakai harus diisi oleh pemilik lahan berserta ahli warisnya, Namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris maka format isian ahli waris dikosongkan saja dan dimintakan keterangan dari Lurah bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak memiliki ahli waris</p>
<p><b>000353020220</b></p>

<b>ISI PENGADUAN</b>
<b>Pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi di lokasi SK Kumuh yang baru di Kelurahan Kamalapati, warga menyampaikan bahwa di wilayah RT 013 pada saat musim hujan air menggenangi rumah, namun ada beberapa warga yang menolak lahan mereka untuk di rencanakan pembangunan saluran drainase.(001/KMLP/PIM/II/2020)</b>
Menjelaskan kepada Masyarakat bahwa syarat mutlak dalam pembangunan infrastruktur sudah tidak permasalahan dengan lahan dan apabila tidak ada kesiapan lahan maka infrastruktur yang di usulkan oleh masyarakat tidak bisa di bangun
<b>000374710220</b>
<b>Ada salah satu pemanfaat sumur bor tidak mau membayar iuran bulanan dengan alasan kualitas air sumur belum layak digunakan (02)</b>
KSM dan KPP telah melakukan uji kualitas air pada sumur bor. Hasilnya adalah kualitas air tersebut telah layak digunakan. Warga yang tidak mau membayar iuran tersebut sekarang sudah memanfaatkan air sumur Bor dan telah membayar iuran bulanan sumur Bor kepada KPP
<b>000374720220</b>
<b>Apakah yang punya tanah di sumur bor sudah bisa diambil kembali? (002)</b>
Dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa, setelah melakukan rapat antara BKM, Lurah dan pemilik lahan sumur bor maka lahan tersebut statusnya masih izin pakai yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan izin pakai tanah yang ditandatangani oleh pemilik lahan dengan jangka waktu selama 15 tahun. Jadi lahan tersebut belum dapat diambil alih sepenuhnya oleh pemilik lahan
<b>000433100120</b>
<b>Kapan Bank Sampah mulai operasi, karena pengelolaan sampah di RW 06 sudah berjalan namun terkendala tempat yang masih menggunakan rumah pribadi dan sekarang sudah diminta yang punya rumah akhirnya kegiatan pengelolaan sampah di RW 06 berhenti, kalau tidak segera diakomodir Bank Sampah dari KOTAKU permasalahan sampah mengganggu warga</b>
Diagendakan secepatnya melakukan kegiatan studi banding. Sehingga TPS3R yg sudah direncanakan bisa cepat dioperasikan tanpa adanya keluhan dari warga
<b>000433260120</b>
<b>Kenapa masih ada bangunan yang masih berdiri ditengah saluran irigasi sungai, bagaimana sebenarnya aturan yang ada didalam program KOTAKU?</b>
Program Kotaku tidak mengerjakan kegiatan / bangunan diatas saluran irigasi, bangunan yang ada merupakan swadaya masyarakat dan penertiban bangunan i menjadi kewenangan/ tanggung jawab Pihak Irigasi
<b>000453020320</b>
<b>Menyampaikan kepada Faskel bahwa ketua RT 009 susah untuk dihubungi dan tidak bersama staf RT untuk melakukan pendekatan kepemilik lahan yang direncanakan untuk dibangun jalan. (001/KMBJ/PIM/III/2020)</b>
Setelah diadakan pertemuan dan menjelaskan maksud dari rencana kegiatan ini, Ketua RT 009 bersama Staf RT bisa menerimannya dan bersedia untuk melakukan pendekatan kepemilik lahan yang direncanakan untuk dibangun jalan.
<b>000473110220</b>
<b>Kenapa drainase yang telah dibangun menimbulkan banjir,</b>



<b>ISI PENGADUAN</b>
Melakukan koordinasi dengan BKM, KSM dan pemerintah kelurahan dan telah melakukan rapat bersama dan sepakat untuk memperbaiki drainase dan mengakibatkan banjir, pada tanggal 22 Februari 2020, KPP bersama masyarakat telah melakukan perbaikan dengan mengganti bak kontrol dari beton menjadi bak kontrol terbuat dari besi 12 dan memperlebar gorong gorong yang ada dan saat ini sudah tidak banjir lagi
<b>000535030220</b>
<b>Posisi pot bunga di Jl. Muradi menghalangi pengguna Disabilitas</b>
Untuk segera memindahkan pot bunga sehingga tidak menghalangi pengguna disabilitas
<b>000572710220</b>
<b>Mana sudah surat hibah lahan untuk RTP, soalnya yang punya lokasi minta suratnya untuk di tandatangani</b>
Untuk kegiatan RTP di kelurahan Panau, bentuk Pengadaan Tanahnya berupa Pinjam/Pakai Lahan dan telah difasilitasi di tingkat lapangan dan telah ditandatangani oleh pemilik lahan.
<b>000600000120</b>
<p><b>1. Dari hasil cek lapang :</b></p> <p>a) Penyampaian adanya pengaduan terkait kegiatan BPM Kelurahan Sentul KSM Daiman untuk pembangunan saluran dan paving yang mengakibatkan genangan air ( sesuai dengan video yang dilaporkan )</p> <p>b) Membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KSM bersama BKM dan Faskel paska pengaduan.</p> <p>c) Melakukan cek lapang dan konfirmasi kepada warga terdampak yang mengalami genangan.</p> <p>d) Yang sudah dilakukan KSM bersama BKM menambah pipa saluran pembangunan menuju saluran drainase.</p> <p><b>2. Dari hasil cek lapang dan konfirmasi warga terdampak diketahui bahwa :</b></p> <p>a. Sebelum adanya pembangunan saluran drainase air mengalir disepanjang jalan dan pekarangan rumah.</p> <p>b. Genangan yang terjadi menurut P. Damri ( Tukang sekaligus yang terdampak ) genangan hanya 5 menit.</p> <p>Dengan demikian setelah ditambah saluran air bisa mengalir.</p> <p><b>3. Menurut pengakuan P. Suprianto RT.02 RW.05 genangan berkisar sekitar 15 menit air langsung mengalir melalui pipa drainase yang sudah terpasang.</b></p>
<p>1. Dari hasil cek lapang :</p> <p>a) Penyampaian adanya pengaduan terkait kegiatan BPM Kelurahan Sentul KSM Daiman untuk pembangunan saluran dan paving yang mengakibatkan genangan air ( sesuai dengan video yang dilaporkan )</p> <p>b) Membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KSM bersama BKM dan Faskel paska pengaduan.</p> <p>c) Melakukan cek lapang dan konfirmasi kepada warga terdampak yang mengalami genangan.</p> <p>d) Yang sudah dilakukan KSM bersama BKM menambah pipa saluran pembangunan menuju saluran drainase.</p> <p><b>2. Dari hasil cek lapang dan konfirmasi warga terdampak diketahui bahwa :</b></p> <p>a. Sebelum adanya pembangunan saluran drainase air mengalir disepanjang jalan dan pekarangan rumah.</p> <p>b. Genangan yang terjadi menurut P. Damri ( Tukang sekaligus yang terdampak ) genangan hanya 5 menit.</p> <p>Dengan demikian setelah ditambah saluran air bisa mengalir.</p> <p><b>3. Menurut pengakuan P. Suprianto RT.02 RW.05 genangan berkisar sekitar 15 menit air langsung</b></p>

<b>ISI PENGADUAN</b>
mengalir melalui pipa drainase yang sudah terpasang.
<b>000633720220</b>
<b>Untuk IPAL bila Hujan menimbulkan bau.</b>
Perlu KPP untuk bertindak pencegahan dengan menelusuri asal bau, ada kemungkinan proses pemasangan yg kurang sempurna atau adanya kebocoran. klo hujan ipal bau mungkin bisa di cek dulu apakah ada rembesan air hujan yg masuk, klo ada segera dilakukan perbaikan rembesan dgn bonding agen lalu waterproofing, klo tdk ada rembesan ttp bau percepat proses pembusukan bakteri dengan memberi E4 yg menyebabkan bau adalah proses penguraian limbah..
<b>000635100220</b>
<b>Apakah air dari tandon yang di bangun oleh KOTAKU ini bisa di jamin aman untuk di konsumsi warga?</b>
Air yang di hasilkan oleh pengeboran yang di laksanakan oleh program KOTAKU aman untuk di konsumsi oleh masyarakat, karena sudah di lakukan tes ke laboratorium LH dan hasilnya tidak ada kandungan unsur yang berbahaya jika di konsumsi
<b>000673030220</b>
<b>Ada rumah di kawasan pak membangun dekat jalan , pada hal sudah melanggar GSI</b>
BKM akan koordinasi dengan pemerintah kelurahan terkait perijinan atau IMB bangunan tersebut
<b>000735200120</b>
<b>adanya pembongkaran saluran drainase yang mengganggu jaringan PDAM</b>
Sudah dilakukan koordinasi dengan PDAM, dan sudah ada ijin, sebetulnya hal tersebut juga tidak mengganggu aliran PDAM, hanya saja pipa PDAM tersebut nampak terlihat karena sedang dilakukan penggalian, dan setelah itu ditutup atau diurug kembali sehingga saat ini sudah clear
<b>000762710320</b>
<b>Adanya surat ijin pakai pada lahan mck selama 10 tahun, setelah 10 tahun bagaimana status lahan tersebut?(01/PIM/III/2020)</b>
Untuk ijin pakai pada mck 10 tahun, jika masa telah selesai selama 10 tahun maka harus diadakan rapat dan musrawarah kembali bersama bkm dan kelurahan, supaya kedepannya bangunan ini tetap ada dan dirawat, dan dapat dilakukan perpanjangan ijin pakai lahan tersebut kembali
<b>000863720120</b>

<b>ISI PENGADUAN</b>
<b>Pekerjaan fisik berupa jalan menjadi kotor karena ada warga yang mendapatkan bedah rumah belum membersihkan bekas bongkaran bangunan (buku PIM no. 03/63720601/I/2020)</b>
LKM telah menjelaskan, nanti akan disampaikan ke fasilitator pendamping (BSPS)/dinas terkait (DinasPerkim) supaya membersihkan bongkaran tersebut, dan hal sudah di laksanakan serta dapat ditindaklanjuti secara tepat sehingga tidak ada lagi sisa bongkaran bangunan tersebut
<b>000891710120</b>
<b>Ibu Ariani sebagai kepala kelurahan di Kelurahan Malabutor meminta agar ada tindak lanjut penyelesaian dari container sampah yang sampai sekarang sampah belum diangkat dari bulan oktober 2019, yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak nyaman karena bau sampah (01)</b>
SETELAH MELAKUKAN REMBUG LURAH DAN WARGA SEPAKAT LAHAN KONTENER AKAN DI LETAKAN DI DAERAH YANG LEBIH STRATEGIS. Berdasarkan hasil rembug kesepakatan warga dan di dukung dengan SPPL no. 660.1/23-SPPL/2019 serta didasari dengan ijin pakai penggunaan lahan pada tanggal 21/01/2020 menyatakan bahwa lokasi RT 02 RW 05 adalah lokasi strategis untuk penempatan kontener sampah. untuk saat ini kontener sampah telah difungsikan dilokasi tersebut
<b>000933260120</b>
<b>menyampaikan aspirasi warga yang meminta agar di ujung barat jalan beton yang dibangun KOTAKU di Rt 10 agar dibuatkan tanjakan (opritan) dari beton sehingga kuat bisa memudahkan dan aman bagi pengendara yang melewatinya. Saat ini tanjakan (opritan) masih berupa urugan sirtu</b>
Pada Tanggal 25 Januari 2020 telah dibuat opritan jalan yang disusulkan warga
<b>001033720220</b>
<b>sisa luasan deliniasi dipenumping bolehkah kelak kalau mendapat bantuan dialihkan. Karena lahan yg ada magersari.</b>
perlu dilakukan review dokumen RPLP/ RP2KPKP terlebih dulu dan SK kumuh di kota/kabupaten setempat
<b>001035230220</b>
<b>usulan lokasi IPAL di area tanah PJKA bagaimana</b>
Usulan tersebut tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat ijin dari PT KAI
<b>001073110220</b>
<b>Kenapa sebelum dikerjakan kotaku, jalan tidak tergenag air, namun setelah ada kegiatan fisik dari kotaku justru menimbulkan genangan</b>
melakukan pembenahan dengan membongkar pipa pembuangan dan memasang lebih dalam lagi agar air bisa keluar melalui pipa pembuanagn tersebut, pada tanggal 22 Maret 2020 Telah dilakukan perbaikan dengan membuat beberapa lubang pembuangan ke drainase tersebut sehingga saat sudah tidak terjadi lagi genangan
<b>001191710120</b>
<b>saya dan masyarakat di rt 04 tidak bersedia jika kontener di letakkan di lingkungan kami (01)</b>
LURAH DAN WARGA SEPAKAT LAHAN KONTENER AKAN DI LETAKAN DI DAERAH YANG LEBIH STRATEGIS. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam SPPL No. 60.1/21-SPPL/2019 dan rembug warga beserta lurah Disertakan kesepakatan penggunaan lahan berupa ijin pakai yang telah disepakati pada tanggal 09/08/2020 sehingga penempatan kontener sampah diletakkan di daerah RT 01 RW 05.
<b>001233720220</b>
<b>sisa luasan deliniasi dipenumping bolehkah kelak kalau mendapat bantuan dialihkan. Karena lahan yg ada magersari.</b>

<b>ISI PENGADUAN</b>
perlu dilakukan review dokumen RPLP/ RP2KPKP terlebih dulu dan SK kumuh di kota/kabupaten setempat. lahan magersari adalah lahan milik kraton klo masuk dalam lingkup lingkungan kawasan kraton termasuk dalam kawasan cagar budaya..salah satu aspek yg harus diperhatikan..penanganan kawasan cagar budaya merupakan kewenangan instansi terkait...
<b>001235130120</b>
<b>KPP,masyarakat,pihak Desa dan BKM duduk bersama untuk membahas kegiatan untuk jalan agar rata dengan tutup drainase supaya mengutamakan kualitas serta keselamatan baik selama pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan</b>
KPP,masyarakat,pihak Desa dan BKM duduk bersama untuk membahas kegiatan untuk jalan agar rata dengan tutup drainase supaya mengutamakan kualitas serta keselamatan baik selama pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan
<b>001291710320</b>
<b>Apakah Kotaku juga memberikan bantuan untuk masyarakat MBR yang memiliki lahan untuk bercocok tanam namun tidak memiliki peralatan untuk mengolah lahannya seperti : cangkul, bibit, penyiram dll. (01)</b>
Fasilitator memebrikan penjelasan kepada Pak Yendri dan telah paham bahwa kotaku tidak memberikan bantuan pengadaan alat bercocok tanam tetapi dapat disampaikan kepada BKM untuk kolaborasi dengan berbagai pihak
<b>001463710120</b>
<b>Pipa penghubung dari wc ke biofil bocor sehingga air merembes keluar(001/63710509/I/20)</b>
Oleh Tukang dilakukan Perbaikan dgn melakukan pembongkaran dan dipasang kembali dengan menggunakan lem yang kuat, tidak bocor lagi
<b>001473710220</b>
<b>Adanya material pembangunan penginapan yang di simpan di atas drainase yang baru dikerja sehingga terlihat kumuh</b>
Tumpukan material sudah selesai dibersihkan dan drainase berfungsi baik
<b>001474710120</b>
<b>pekerjaan sudah selesai tapi sisa material masih berserakan di pinggir jalan. (001)</b>
BKM melalui KSM Pelaksana telah membersihkan sisa material pekerjaan yang masih tersisa sehingga tidak lagi mengganggu pengguna jalan dan transportasi di lokasi tersebut.
<b>001535200320</b>
<b>apakah tanah milik pengairan dapat diusulkan didanai dari laba UPK</b>
Lahan Pemerintah sebaiknya tidak dikerjakan, kecuali mendapat ijin dari yang berwenang
<b>001552010320</b>
<b>Pihak Desa memberikan saran/masukan Sebaiknya untuk kegiatan yang menggunakan lahan pribadi untuk kebutuhan umum dibuatkan berita acara/surat pernyataan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari (1)</b>
Askot Mandiri memberikan penjelasan bahwa memang seharusnya dibuatkan berita acara atau surat pernyataan ,dan itu merupakan aturan dari program KOTAKU untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
<b>001572710220</b>
<b>Masalah legalitas lahan apakah lahan yang digunakan untuk pembangunan sumur bor akan diganti rugi?</b>

<b>ISI PENGADUAN</b>
Bersama aparat kelurahan, faskel teknik menyampaikan bahwa lahan untuk pembangunan sumur bor tidak akan mendapatkan ganti rugi dari Program. Jadi bentuk pengadaan lahan itu berupa hibah lahan atau Izin Pinjam/Pakai Lahan dengan ketentuan minimal 5 tahun dipinjamkan oleh pemilik lahan tersebut.
<b>001635080220</b>
<b>Apakah bisa mendapatkan bantuan jamban bila tanah masih berstatus sewa?</b>
Tidak bisa karena status lahan harus jelas dan status pengadaan lahan juga
<b>001752010220</b>
<b>Kegiatan skala kawasan atau membangun jalan di pinggir sungai kenapa sampai hari ini belum dilaksanakan apa kendalanya (1)</b>
Berdasarkan penjelasan WaliKota Bima pada saat Lokakarya Pelaksanaan Penataan Skala Kawasan (Ratu Raga Mantika) yang berlangsung pada Bulan awal Oktober 2019 bahwa pemerintah Kota Bima sudah menyiapkan semua Persyaratan dan dokumen Teknis termasuk sharing pendanaan sebesar Rp. 24 Milyar dari Program Kotaku dan Rp. 3 Milyar dari APBD Perubahan 2019 yang secara teknis tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, saat ini kita masih menunggu hasil Lelang di Jakarta yang saat ini sementara dalam proses.
<b>001752710120</b>
<b>Warga an : H.Sahlan rois (warga terdampak proyek) telah melakukan pembongkaran dan penembokan pekarangan kembali, namun yang bersangkutan melakukan penembokan masih dalam tanah yang sudah di bebaskan (lebih 30 cm) (1)</b>
Sudah difasilitasi oleh Tim KOTAKU Kota Mataram bahwa yang bersangkutan sudah diberikan penjelasan bahwa titik pengukuran lebar jalan 6 meter dari talud bagian luar sungai DAS Jangkok ( salah mengambil titik nol , yang bersangkutan mengambilnya dari bagian dalam talud DAS Jangkok) dan sudah dilakukan pembongkaran untuk menyesuaikan lebar jalan 6 meter.
<b>001771730220</b>
<b>MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KEBIJAKAN KEPADA PENERIMA MANFAAT RTLH YANG STATUS LAHAN MASIH 'PINJAM'</b>
TRIMA KASIH UNTUK SARANNYA, SARAN TERSEBUT AKAN SEGERA KAMI INFOKAN KE PEMERINTAH KELURAHAN YANG BERWEWENANG DALAM PENENTUAN PENERIMAAN BANTUAN RTLH
<b>001835720120</b>
<b>Diberikan penjelasan, walaupun kegiatan berada di Lokasi SK tetapi kalo status lahannya adalah Illegal itu tidak boleh dilakukan pembangunan</b>
Diberikan penjelasan, walaupun kegiatan berada di Lokasi SK tetapi kalo status lahannya adalah Illegal itu tidak boleh dilakukan pembangunan
<b>001871730220</b>
<b>MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KEBIJAKAN KEPADA PENERIMA MANFAAT RTLH YANG STATUS LAHAN MASIH 'PINJAM'</b>
TRIMA KASIH UNTUK SARANNYA, SARAN TERSEBUT AKAN SEGERA KAMI INFOKAN KE PEMERINTAH KELURAHAN YANG BERWEWENANG DALAM PENENTUAN PENERIMAAN BANTUAN RTLH
<b>001933090120</b>
<b>Kegiatan pembangunan yang dilakukan di KOTAKU apakah syarat mutlak dikerjakan di lahan yang status nya legal ?</b>

<b>ISI PENGADUAN</b>
Dilakukan pertemuan dengan pihak desa terkait penggunaan lahan, karena dalam program KOTAKU tidak bisa digunakan untuk pembangunan di lokasi/lahan yang belum sah (harus legal) dengan ijin secara legal formal kepada pemilik lahan
<b>001935200120</b>
<b>adanya tumpukan galian dalam pembangunan drainase yang mengganggu lalulintas warga</b>
Semua material bahan bangunan sudah ditata, di taruh dipinggir jalan, dan diatur jaraknya agar tidak mengganggu aktifitas warga baik yang berkendara roda 4, roda 2 maupun yang jalan kaki, semua tetap bisa melintas
<b>001994710120</b>
<b>Sumur bor yang di bangun sudah di lakukan pengurusan namun masih tetap berbau</b>
fasilitator menyarankan kepada KPP untuk menguras satu kali lagi dan memasukan kaporit air, dan hasilnya air sudah tidak berbau dan bisa di nikmati warga
<b>002091710220</b>
<b>Karena Ada pembangunan biotank di bawah rumah menyebabkan air masuk ke dalam rumah setiap kali dipukul ombak, bagaimana solusinya supaya tidak masuk di rumah warga tolong dibuatkan pemecah ombak (02)</b>
Telah difasilitasi dengan mengarahkan tukang untuk dibuat beton pemecah ombak sehingga air tidak masuk kerumah warga. Untuk menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan kondisi lingkungan, maka pembangunan dilakukan berdasarkan kesepakatan ijin pakai lahan pada tanggal 20 agustus 2019 dan disertai dengan SPPL No. 660.1/28/SPPL/2019, sehingga proses kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
<b>002094710120</b>
<b>Sirtu Ipal belum di masukan kedalam kesing ipal sehingga meggagu aktifitas masyarakat</b>
Fasilitator melakukan koordinasi untuk percepatan pembangunan ipal sehingga material bisa di masukan kedalam kesing sehingga pada tanggal 24 januari sirtu di masukan kedalam casing ipal komunal
<b>002252010320</b>
<b>Pihak Desa memberikan saran/masukan Sebaiknya untuk kegiatan yang menggunakan lahan pribadi untuk kebutuhan umum dibuatkan berita acara/surat pernyataan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari (3)</b>
Fasilitator memberikan penjelasan bahwa memang seharusnya dibuatkan berita acara atau surat pernyataan ,dan itu merupakan aturan dari program KOTAKU untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
<b>002273060120</b>
<b>KOMPLAIN MENGENAI PEKERJAAN PLAT DEUCKER TAHUN 2018 YANG TIDAK DIBONGKAR</b>
Kegiatan Infrastruktur berupa plat Duecker telah dibongkar dan dibenahi oleh KPP Kel. Kalegowa, proses pembongkaran sampai pada tahap penyelesaian melibatkan warga masyarakat dengan biaya bersumber dari iuran KPP
<b>002391710220</b>
<b>saya merasa keberatan dengan adanya biotank di lingkungan ini karena uap yang ditimbulkan sangat mengganggu warga (01)</b>

<b>ISI PENGADUAN</b>
<p>KSM dan Tukang memasang pipa pembuangan udara sehingga tidak menguap dan mengganggu warga. Dari hasil pengawasan dan pemantauan dilapangan, perlu ada peningkatan kualitas infrastruktur. Berdasarkan SPPL No. 660.1/17-SPPL/2019 serta sesuai dengan standar perencanaan limbah pembuangan, telah dilakukan peningkatan perbaikan sesuai dengan standar yang telah direncanakan.</p>
<b>002571730220</b>
<b>Mengusulkan ada dana untuk pembebasan lahan bila akan dilaksanakan pekerjaan infrastruktur</b>
<p>Trima Kasih untuk usulan tersebut. Sebagai informasi bahwa program kotaku tidak bisa membiayai pembebasan lahan untuk kegiatan infrastruktur yang ada di lingkungan atau di kelurahan. Biasanya untuk kesiapan dan bentuk wadaya dari keluhan/ lingkungan mereka mencarikan lokasi atau lahan-lahan yang bisa di berikan ijin pakai atau hibah secara swadaya tanpa ada pembayaran.</p>
<b>002573710120</b>
<b>Pekerjaan Drainase sekarang yang berlokasi di RW001,yang dikerja KSM (BPM) sekarang tidak terkoneksi ke drainase lain,sebab ada warga yang menolak digali depan rumahnya ketakutannya siapa tau naik air dan bertumpuk air, dan roboh pondasi rumahnya,</b>
<p>Jadi BKM,KSM bersama lurah memanggil yang bersangkutan memberikan pemahaman, sebagai solusinya dipasang ngi pipa besar kurang lebih 2 meter, jadi air sudah mengalir sekarang.</p>
<b>002635090320</b>
<b>Terkait kegiatan kolaborasi DAK RTLH yang akan dilaksanakan di Kel. Patrang, untuk rumah yang berstatus tanah waqaf apakah boleh diajukan?</b>
<p>Terkait juklak/juknis kegiatan DAK RTLH bahwa rumah tersebut boleh diajukan, namun tetap disertai surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan</p>
<b>002875710120</b>
<b>Hidran air yang ada dikelurahan pohe yang ada di RT001-RW001 sudah bocor dan mengakibatkan tergerusnya tanah yang ada di sekitarnya, apalagi posisi Tiang penyangga hidran terletak di tanah yang tidak rata ( 08 )</b>
<p>Meninjau kembali kondisi hidran dan diperoleh solusi atas permasalahan yang ada yaitu : 1. Penerima manfaat akan memperbaiki kebocoran, dan membuat lantai dibawah hidran agar tidak terjadi gerusan yang lebih parah lagi. 2. KPP melakukan pengecekan untuk memaksimalkan fungsi hidrant</p>
<b>002991710220</b>
<b>Bapak tatang menyarankan terkait surat ijin pengesahan UKL/UPL untuk ijin lingkungan lingkungan hidup telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPM PTSP untuk selanjutnya diterbitkan oleh DPM PTSP sehingga kotaku tolong tindak lanjuti (01)</b>
<p>Tim Korkot telah berkonsultasi dengan tim POKJA Kota Sorong dan sudah dikeluarkan surat permohonan izin penerbitan registrasi dokumen UKL - UPL No. 001/POKJA/-PKP/II/2019 dan sudah diserahkan ke dinas DPPLH melalui Dinas PMPTSP terkait proses selanjutnya. sehingga dari petugas perijinan menginformasikan untuk digandakan dokumen UKL UPL menjadi 4 rangkap, pada tanggal 27/05/2020 telah diserahkan hasil penggandaan dokumen, tinggal menunggu informasi proses keluarnya hasil registrasi dokumen UKL UPL.</p>
<b>003135060220</b>
<b>Banyak warga yang mengalihkan fungsi dari drainase</b>
<p>Tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kenyamanan, keasrian, dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman</p> <p>1. Akan meningkatnya</p> <p>2. Mengakibatkan banjir dan genangan</p>

<b>ISI PENGADUAN</b>
<b>003271730220</b>
<b>Usul untuk diberikan kebijakan khusus terkait RTLH untuk orang yang meminjam tanah untuk rumah tinggal</b>
Usulan tersebut kami terima dan akan kami teruskan ke pemerintah kelurahan. Karena pemerintah kelurahan adalah pihak yang berwenang dalam pengamilan keputusan terkait penerima manfaat RTLH Dan Penanya juga diberi masukan dan informasi tentang status lahan penerima manfaat
<b>003291710120</b>
<b>KAPAN KAMI AKAN DIGANTI RUGI, TINGGAL PERTEMUAN TERUS TAPI TIDAK ADA REALISASI (01)</b>
SETELAH DIBERI PENJELASAN YANG BERSANGKUTAN MEMAHAMI BAHWA TERKAIT GANTI RUGI MENUNGGU INFO DARI PEMERINTAH KOTA. Pada TGL 28/05/2020 Balai Prasaran dan Permukiman telah melakukan kordinasi dengan Tim Pokja (Dinas Bappeda & Dinas Pertanahan) terkait Perhitungan ganti rugi dan telah merekap data baik ganti rugi bangunan ataupun ganti rugi tanaman tumbuh.
<b>003352710120</b>
<b>Menyampaikan ke Lurah tentang beberapa warga terdampak pembangunan (WTP) Kawasan DAS Jangkuk yang belum merobohkan bagian rumah / fisik lainnya yang berada diatas dan dibawah lahan yang sudah dibayar kepada masing-masing WTP, agar pihak kelurahan ikut serta memfasilitasi WTP untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati (1)</b>
Sudah difasilitasi oleh Tim KOTAKU Kota Mataram dan Lurah Pejeruk sehingga warga untuk segera membongkar bangunan diatas tanah yang sudah dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram. Warga dikumpulkan di rumah Ketua RT dan setelah diberikan penjelasan, setelah itu 2 (dua) hari kemudian semua sudah dirobokkan karena kegiatan pembangunan akan segera dimulai.
<b>003435150220</b>
<b>APE untuk beautifikasi rusak</b>
Sudah Dilakukan Penggantian dan perbaikan APE yang rusak oleh warga secara swadaya
<b>003675710120</b>
<b>Air Limbah masyarakat mengalir ke Ruas jalan Sehingga menyebabkan genangan dan Bau Busuk ( 08 )</b>
hal ini di sebab kan karena saluran yang ada sudah tertimbun sehingga tidak mampu menampung limpasan air limbah oleh karena itu BKM telah melakukan kemunakasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan terkait persoalan ini dan alternatif solusi yang di berikan 1.akan melakukan pengerukan terhadap saluran tersebut dengan menggunakan swadaya masyarakat, 2. akan di buatkan saluran pembuangan air limbah dengan menggunakan dana kelurahan dan swadaya masyarakat.
<b>005635040220</b>
<b>Gimana cara mengatasi sumber air yang jaraknya dari septicktank kurang dr 10 meter, apa ada teknisnya?</b>
Bisa dikelompokan warga yang sumurnya dekat dengan septicktank untuk pembuatan IPAL komunal secara kecil atau Biofil biofil
<b>007735070120</b>
<b>Memberi pengarahan kepada WTP pentingnya pembangunan drainase dan Memberi Hak WTP berupa Bentuk kompensasi kepada WTP yang dilakukan atas bangunan rumah yang mereka miliki, namun pada plat decker diatas saluran drainase akses jalan ke rumah yang harus hilang terkena bongkaran. Selama masa kontruksi akses warga difasilitasi dengan akses sementara/ darurat dengan menggunakan material lama atau papan kayu.</b>



**ISI PENGADUAN**

WRGA BISA PAHAM DAN MNENERIONG UNTUK PENGEMBLIAN JALAN.A DAN SELAJUTNYA HARI MINGGU AKAN DILAKSANAKAN KERJABAKTI GOTONG RO